

## **VI. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah penulis lakukan pada bagian terdahulu, maka kesimpulan penelitian dan pembahasan hasil adalah:

1. Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dilaksanakan melalui tahapan penetapan lokasi, penyuluhan, pengukuran dan pemetaan, pengumpulan data yuridis, pengumuman, penetapan hak, pembukuan hak, penerbitan sertifikat, dan penyerahan sertifikat. Pelaksanaan sertifikasi tanah melalui PRONA dilaksanakan pada tahun 2013 dan 2014 di Kabupaten Pringsewu;
2. Masalah dalam PRONA 2013 adalah adanya pungutan biaya yang seharusnya gratis karena biaya PRONA sudah ditanggung oleh APBD, dan pada tahun 2014 masalah PRONA karena pengumuman dari panitia pengumpulan data yuridis yang dilakukan kurang jelas, mengenai pemberitahuan syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh masyarakat, sehingga banyak syarat-syarat dalam pendaftaran PRONA masih ada yang belum melengkapi persyaratannya, kemudian saat penerbitan sertifikat PRONA yang lama memakan waktu hampir tiga

bulan, karena seharusnya penerbitan sampai pembagian sertifikat hanya membutuhkan waktu 30 hari;

3. Pengawasan PRONA di Kabupaten Pringsewu tahun 2013 dan 2014 sudah efektif, hal tersebut ditunjukkan dengan pengawasan yang dilakukan oleh POKMAS, LSM dan media massa dalam bentuk penyelesaian masalah seperti adanya klarifikasi dan musyawarah mengenai rincian dana yang harus dikeluarkan masyarakat, kemudian dimuatnya keluhan masyarakat pada media cetak, penyampaian aspirasi secara langsung kepada Badan Pertanahan Nasional serta pelaporan langsung oleh POKMAS dan LSM kepada panitia PRONA dari BPN mengenai kelengkapan syarat-syarat dan lamanya penyerahan sertifikat. Selanjutnya, pengawasan PRONA memberi dampak baik untuk perbaikan pelayanan, dimulai dari cepat tanggapnya para panitia BPN serta terjalin komunikasi yang lebih baik antara panitia PRONA dan masyarakat terkait pengadaan PRONA tahun 2016.

## **B. Saran**

Saran-saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Di dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan PRONA di Kabupaten Pringsewu disarankan agar para pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang berhubungan dengan pelaksanaan

program PRONA lebih meningkatkan koordinasi sehingga mengurangi lambannya kinerja BPN;

2. Perlu adanya transparansi biaya pelayanan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dan jangka waktu penyelesaian dalam penyertifikatan tanah, sehingga menumbuhkan minat masyarakat untuk melaksanakan pendaftaran tanah;
3. Untuk lebih memantapkan keberhasilan pelaksanaan PRONA dengan program sertifikasi tanah secara massal yang ditujukan bagi golongan ekonomi lemah sampai menengah, agar tetap diadakan penyuluhan-penyuluhan tentang akses tanah bagi masyarakat sehingga sertifikat tanah yang telah dimiliki masyarakat dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri;
4. Lembaga Swadaya Masyarakat dan media massa sebagai mediator disarankan untuk dapat lebih peka dalam menampung keluhan-keluhan masyarakat agar dapat memberitahukan kepada pemerintah yang menjadi masalah dalam masyarakat dan dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam program-program pemerintah khususnya PRONA.